

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, penerapan teknologi informasi (TI) dalam sebuah organisasi sangat penting. Banyak sekali manfaat penggunaan TI untuk sebuah organisasi/ perusahaan, diantaranya memudahkan dalam memperoleh informasi dan memudahkan komunikasi, meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan publik. Menurut penelitian Center of Innovation Policy and Governance (CIPG) yang dirilis pekan lalu, saat ini laju penetrasi internet Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia yang kini sudah mencapai 51%. Angka yang lebih fenomenal terlihat dari jumlah pengguna seluler. Di tahun 2016, diprediksi ada sekitar 371,4 juta nomor seluler yang aktif di Indonesia. Jumlah tersebut bahkan lebih besar dari pada proyeksi jumlah penduduk Indonesia yakni 261,89 juta penduduk. Dalam penerapannya diperlukan pemahaman mengenai TI yang akan diterapkan, seperti konsep tata kelola yang digunakan, teknologi yang digunakan serta pengelolaan dan pengembangan yang ada. Hal tersebut bisa menjadi penghambat jika dalam penerapan TI tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan dari organisasi, sehingga TI kurang terasa manfaatnya bagi organisasi. Kegagalan TI dapat menghambat organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Untuk itu diperlukan Tata Kelola dan Pengelolaan TI yang baik.

Menurut (Van & Haes, 2005), menyatakan bahwa tata kelola didefinisikan sebagai kapasitas organisasi yang dilakukan oleh Dewan, manajemen eksekutif, dan manajemen TI guna untuk mengontrol penyusunan dan implementasi strategi TI, serta memastikan perpaduan bisnis dan TI. Namun faktanya di lapangan *top management* memberikan perhatian yang besar pada strategi bisnis namun peranan TI terabaikan yang kenyataannya, TI membutuhkan investasi yang sangat besar dan beresiko tinggi. Tata kelola yang terabaikan akan menjadi awal dari suatu bencana (ITGI, 2003). Tata Kelola TI itu sendiri merupakan sebuah proses

untuk mengatur, mengontrol dan mengelola sebuah organisasi agar bisa selaras dengan penggunaan TI yang diterapkan sehingga bisa mencapai tujuan organisasinya. Tanpa Tata Kelola dan Pengelolaan TI yang baik maka penerapan TI tidak akan maksimal.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika pasal 5 poin “b” menyatakan bahwa “terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah”, bunyi poin tersebut merupakan sasaran penyelenggaran komunikasi dan informatika yang berlaku untuk setiap pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Sasaran tersebut dengan jelas mengatakan bahwa dengan adanya TIK suatu proses manajemen dalam pemerintahan dapat dijalankan dengan baik dan diatur dalam sebuah tata kelola yang baik pula. Sedangkan pada pasal yang sama poin “c” menyatakan bahwa “terselenggaranya pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi”. Berdasarkan peraturan daerah yang telah disebutkan sangat jelas bahwa pada level pemerintah daerah memerlukan TIK dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya itu, TIK menuntut pemerintah memiliki tata kelola pemerintahan agar proses manajemen dapat berjalan dengan baik.

Terkait pelayanan publik yang merupakan tugas utama dari suatu pemerintahan, TI juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 45 mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang menjelaskan bahwa dengan pemanfaatan TI, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Harapannya jika pemanfaatan TI pada pelayanan publik ini dikelola dengan baik dapat mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Untuk pelayanan publik Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi telah memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE digunakan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan

juga akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelayanan publik yang memanfaatkan SPBE ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka diperlukan Tata Kelola TI yang baik.

Ada beberapa kerangka kerja untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi yang dijadikan organisasi sebagai pedoman dan *best practice* yang berfokus pada pengelolaan teknologi informasi, yaitu ITIL, ISO 20000 dan COBIT 5. COBIT 5 dipilih dalam penelitian ini karena ia bersifat komprehensif dimana memuat prinsip-prinsip, praktek-praktek, alat-alat analisis dan model yang dapat diterima secara global. COBIT 5 dapat menjadi alat bantu untuk memecahkan permasalahan tata kelola TI dengan memahami resiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya organisasi.

Diskominfo arpus Kota Cimahi adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dalam lingkungan pemerintahan Kota Cimahi. Pemanfaatan dan penerapan TI SPBE oleh Diskominfo arpus Kota Cimahi berperan sangat penting dalam pemenuhan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan *assesment* Indikator SPBE diperoleh bahwa tingkat pelaksanaan tata kelola TI SPBE di Diskominfo Arpus Kota Cimahi saat ini rata-rata berada di *level* 3,5. Dengan demikian target kinerja tujuan/sasaran pada indikator Indeks SPBE di Diskominfo arpus Kota Cimahi tahun 2020 yakni di *level* 3,5 belum tercapai. Melalui pengukuran indikator TI SPBE menggunakan kerangka kerja COBIT 5 yang berfokus pada domain BAI maka dapat dianalisa kesenjangannya serta dihasilkan rekomendasi perbaikan dan pengembangannya sehingga Pemerintahan Kota Cimahi dapat memperoleh manfaat berupa kesempatan untuk meningkatkan kualitas operasionalnya pada penerapan IT dalam pelayanan publik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dituliskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rancangan solusi Tata Kelola TI SPBE menggunakan kerangka kerja COBIT 5 pada domain Build, Acquire, Implement (BAI) di Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menghasilkan output tentang pengelolaan data pribadi yang sesuai dengan instansi terkait yang menjadi objek penelitian.

Detail tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan solusi Tata Kelola TI SPBE Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan hasil *assesment*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan keterbukaan wawasan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi terkait pentingnya tata kelola teknologi informasi.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan untuk penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang tepat bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi
3. Memberikan rekomendasi dalam menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik agar berjalan sesuai strategi bisnis dan tujuan

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini, yaitu:

1. Objek penelitian pada tugas akhir ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi
2. Pedoman dalam perancangan tata kelola teknologi informasi yang dilakukan menggunakan standar COBIT 5
3. Pada penelitian ini tidak membahas pengembangan, perencanaan strategis dan pengelolaan aplikasi

4. Penelitian pada tugas akhir ini mencakup assessment kondisi tata kelola, analisis *gap* dan penyusunan roadmap sesuai ruang lingkup domain BAI pada COBIT 5
5. Penelitian pada tugas akhir ini tidak mencakup assessment kondisi tata kelola, analisis *gap* dan penyusunan roadmap sesuai ruang lingkup domain EDM, APO, MEA dan DSS pada COBIT 5